

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Jepang memiliki posisi sangat penting dalam perekonomian global dewasa ini. Tentu saja hal ini bukan merupakan suatu hal yang terjadi begitu saja, tetapi melalui proses panjang. Untuk dapat memahami dengan baik Jepang dewasa ini, kiranya perlu menelusuri kembali proses yang telah dilalui bangsa Jepang, termasuk hubungannya dengan negara-negara lain.

Diawali dengan modernisasi Jepang, atau Restorasi Meiji (1868), yakni peristiwa yang menandai runtuhnya sistem feodal pemerintahan Tokugawa dan menempatkan kembali Tenno (Kaisar) sebagai penguasa tertinggi pemerintahan. Jepang yang sebelumnya, yakni pada periode Tokugawa (zaman Edo, 1603-1868) menerapkan politik pintu tertutup (*sakoku*) selama lebih dari 250 tahun, pada tahun 1868 membuka negeri (*kaikoku*)-nya bagi bangsa barat.

Pembaruan yang dilakukan oleh Kaisar Meiji berhasil menjadikan negaranya sebagai negara industri yang mulai disegani oleh negara-negara Barat. Sebagai sebuah negara industri, tetapi disisi lain bangsa Jepang dihadapkan pada dua permasalahan penting. *Pertama*, bagaimana memperoleh sumber bahan mentah (*raw material resources*) yang sangat dibutuhkan untuk mempertahankan kesinambungan industrialisasinya. *Kedua*, bagaimana memasarkan hasil-hasil industrinya ke luar Jepang sehingga akan memberikan keuntungan ekonomis bagi negaranya. Kedua persoalan itu kemudian ditafsirkan oleh sebagian bangsa Jepang sebagai cara untuk mengamankan kepentingan Jepang di negara-negara

tetangganya. Mereka beranggapan bahwa satu-satunya jalan yang mesti ditempuh oleh Pemerintah Jepang adalah melakukan ekspansi terhadap negara-negara di sekitar Jepang terutama yang memiliki potensi sumber daya alam dan dapat dijadikan pasar bagi hasil industry negaranya. Oleh karena itu, Kaisar Meiji beranggapan bahwa kekuatan militer Jepang harus diperbarui pula. Inilah alasan Jepang mengekspansi Negara-negara dikawasana Asia timur dan Asia Tenggara sampai berakhirnya Perang Dunia ke II dimana Jepang menyerah tanpa syarat setelah tentara sekutu yang dikepalai oleh Amerika Serikat menjatuhkan bom atom di Hiroshima dan Nagasaki.

Pada masa pemerintahan Perdana Menteri Yoshida Sigeru yang merupakan perdana menteri Jepang periode 1946 – 1947 dan 1948 – 1954.¹ Setelah Perang dunia II, dimana Jepang mengalami kekalahan dan lebih condong kearah rehalibitasi ekonomi daripada ke arah isu keamanan. mulanya Jepang berusaha untuk mencari tempat agar diterima oleh masyarakat internasional segera setelah Jepang mendapatkan kemerdekaan negaranya pada tahun 1952. Dengan susah payah Jepang mencari cara agar dapat kembali diterima dalam masyarakat internasional. Barulah kemudian Pada tahun 1970 hasil kerja keras selama 3 dekade melalui diplomasi ekonomi yang dikenal dengan "doktrin Yoshida", menempatkan Jepang sebagai negara dengan perekonomian terbesar kedua setelah Amerika Serikat.

Sebagai negara dengan sumber alam yang minim dan kondisi alam yang rawan bencana, membuat Jepang harus mencari alternatif lain agar dapat bertahan sebagai sebuah bangsa yang utuh. Dengan demikian tidak dapat

¹ Charity, Naoko. *Yoshida Doctrine – Japan's Post War Economic Succes.*
<http://retnosawitri.blogspot.com/2012/12/yoshida-doctrine.html?m=1>. Diakses 27 Juli 2013

dipungkiri kebutuhan Jepang terhadap negara-negara ASEAN akan sumber alam dan sebagai target market ekonomi semakin kuat. Walaupun hubungan antara Jepang dengan negara-negara ASEAN sudah berlangsung pada February tahun 1974, tetapi pada prakteknya hubungan tersebut baru dapat terselenggara dengan baik pada tahun 1977 yaitu pada saat forum Jepang dan ASEAN diselenggarakan.

Keberhasilan "doktrin Yoshida" yang memformulasikan diplomasi ekonomi menjadi awal yang baik dalam hubungan Jepang dan negara-negara ASEAN. Kebijakan ini pun dilanjutkan dengan upaya pembayaran ganti rugi semasa perang kepada negara-negara bekas jajahan Jepang dimasa perang berlangsung.

Kerjasama ekonomi ini menghasilkan kebergantungan yang sangat tinggi bagi negara-negara ASEAN terhadap peran industri Jepang. Namun diplomasi ekonomi yang dicanangkan oleh pemerintah Jepang menjadi senjata yang justru berbalik arah melawan Jepang, yang menuduh Jepang hanya memikirkan kepentingannya sendiri sehingga Jepang dijuluki sebagai Negara "*economic animal*". Dengan demikian para pembuat kebijakan di era Fukuda berinisiatif untuk menjalin kembali hubungan dengan negara-negara ASEAN dengan kebijakan yang baru.

Dengan begitu lahirlah sebuah prinsip dasar dari kebijakan luar negeri Jepang terhadap negara-negara ASEAN yang terdiri dari tiga prinsip yaitu; (1) Jepang menolak kekuatan militer dan berjanji untuk ikut serta berkontribusi terhadap upaya menjaga perdamaian di kawasan ASEAN, (2) Jepang akan berupaya melakukan yang terbaik untuk menjalin hubungan dan kerjasama dengan rasa percaya diri berdasarkan kepercayaan dari "hati ke hati", (3) Jepang

akan menjadi partner yang sejajar bagi negara-negara ASEAN dan bekerja sama secara positif berdasarkan rasa saling percaya.²

Melalui doktrin Fukuda tersebutlah Jepang dapat menjalin hubungan yang lebih dekat lagi dengan negara-negara ASEAN dengan harapan rasa curiga yang selama ini dikawatirkan dikit demi sedikit dapat terhapus dan muncul rasa saling percaya.

Diplomasi ekonomi telah dimulai Jepang pada masa 1980-an sampai 1990, di mana Jepang mulai mengkonsentrasikan pemberian bantuan untuk program pengembangan di Asia.

Untuk menjalankan diplomasi ekonomi, Jepang menerapkan pendekatan dengan pemberian bantuan luar negeri.³ Bentuk bantuan tersebut meliputi berbagai aspek, dari perkembangan teknologi, social, bantuan korban bencana alam, dan yang terutama ekonomi⁴. Bentuk bantuan Jepang itu terstruktur dalam bentuk bantuan yang disebut *Official Development Assistance (ODA)*.

Pada dasarnya ada empat tahap perkembangan ODA Jepang itu sendiri, yakni: *Pertama*, pada tahun 1946-1951, tahap dimana Jepang masih menjadi negara penerima ODA asing, seperti dari Amerika Serikat dan Bank dunia. *Kedua*, tahun 1954 saat Jepang bergabung dalam Colombo Plan, menandai dimulainya penyaluran bantuan luar negeri Jepang ke sejumlah negara-negara di Asia. Melalui program reparasi perang (sebagai alasan awal Jepang dalam

² Sueo Sudo, *The International Relations of Japan and South East Asia (Forging A New Regionalisme)*, Routledge London, 2002. Hal. 36

³ V. R. Tahar, 'Diplomasi Ekonomi Indonesia-Jepang', situs Badan Pendidikan Nasional, <http://els.bappenas.go.id/upload/kliping/diplomasi%20-%20Sp.pdf>, diakses 16 Oktober 2012.

⁴ Kedutaan Besar Jepang untuk Indonesia, 'Bantuan ODA di Indonesia', Situs kedutaan Besar Jepang untuk Indonesia, <http://www.id.emb-japan.go.jp/oda/id/index.htm>, di akses 16 Oktober 2012.

menyalurkan ODA-nya), Jepang menyalurkan bantuan luar negerinya, yang mayoritas pada saat itu berupa bantuan teknis serta hibah. Bantuan-bantuan ini pada dasarnya tidak semata-mata karena motif kemanusiaan ataupun tanggung jawab moral, melainkan justru lebih menekankan pada motif ekonominya. Hal ini terlihat dari bentuk dari bantuan-bantuan yang ada umumnya bersifat mengikat, yang tentunya bertujuan untuk mempromosikan ekspor Jepang semata. Kemudian bentuk bantuan yang ada lebih berkembang pada bentuk pinjaman Yen, ketimbang bentuk bantuan lainnya.

Ketiga, tahap yang terjadi pasca 1976 (sebagai tahap akhir program reparasi perang Jepang). Dalam tahap ini, semenjak masuk bergabung dalam OECD, Jepang menjadi lebih aktif dalam memberikan bantuannya. Salah satu penyebabnya ialah karena adanya sejumlah desakan dari negara-negara maju terutama Amerika Serikat. Jikalau pada tahun 1950 sampai dengan 1960-an motif ODA Jepang ialah murni ekonomi saja (neo-mercantilis), maka sejak 1970-an sampai dengan awal 1980-an orientasi ODA-nya bukan hanya bersifat ekonomi saja, namun juga merambah ke politik, terutama dalam melindungi kepentingan-kepentingan Barat. Serta *keempat*, terjadi sejak tahun 1989, dimana Jepang telah menjadi salah satu pendonor terbesar, terutama untuk wilayah Asia, yang mencapai 66 persen dari total ODA yang disalurkan Jepang pada tahun 1994.

Jepang memiliki lembaga independen Negara bernama *Japan International Cooperation Agency* (JICA) sebagai lembaga yang bertugas menyalurkan bantuan ekonomi dan teknis Melalui alokasi dana pemerintah Jepang yang ditujukan untuk menyalurkan bantuan kepada Negara-negara yang memerlukan terutama bagi Negara berkembang. Dinamika internasional

menunjukkan perkembangan baru dengan munculnya lembaga-lembaga sebagai badan perwakilan Negara yang menawarkan peran penting dalam menjalin hubungan kerjasama antar Negara. Salah satu agen tersebut adalah JICA, yang dididrikan oleh pemerintah Jepang pada tanggal 1 Agustus 1974 di bawah hukum badan kerjasama internasional bagi Negara-negara yang sedang berkembang.⁵ Jepang memulai dengan pemberian bantuan yang terorganisir antara dana dan teknis yang diharapkan meningkatkan kemampuan sumberdaya manusia.

Dinamika hubungan Jepang-Indonesia sudah berlangsung sejak Indonesia berada dalam pemerintahan jajahan Belanda. dimana Jepang melakukan kerjasama dengan pemerintahan Hindia Belanda. Memasuki tahun 1940-an, kerenggangan hubungan keduanya memuncak menjadi peperangan. Kemudian Indonesia menjadi jajahan Jepang semenjak Januari 1942 sampai Agustus 1945. Setelah merdeka pada tahun 1945, secara umum terjadi kebencian terhadap Jepang. Namun di tahun 1951, mulai muncul tuntutan atas pampasan perang. Hubungan ekonomi terus terjaga sampai datangnya demonstrasi anti modal asing di tahun 1974, Sehingga Peristiwa itu dikenal dengan Malari (Malapetaka Limabelas Januari), Demonstrasi itu digelar saat Perdana Menteri (PM) Jepang Tanaka Kakuei sedang berkunjung ke Jakarta (14-17 Januari 1974).⁶ Namun segera setelah tahun itu, keharmonisan hubungan keduanya terus terjaga. Bahkan tak hanya di bidang ekonomi dan politik, tapi juga kebudayaan.

Posisi geografis Indonesia yang memiliki kepentingan strategis bagi ekonomi Jepang, merupakan salah satu faktor terbinanya hubungan bilateral yang

⁵ <http://www.jica.go.jp/english/about/history/>, di akses tanggal 16 Oktober 2012.

⁶ Jejak Soeharto : Peristiwa Malari "The Shadow of an Unseen Hand"
<http://serbasejarah.wordpress.com/2011/12/21/jejak-soeharto-peristiwa-malarithe-shadow-of-an-unseen-hand/> Di akses tgl 3 juli 2013.

harus dipertahankan secara baik oleh pihak Jepang.

Karena secara geografis banyak faktor yang menyebabkan Jepang masih bergantung kepada Negara lain, seperti sumber daya alam, dan pasar. Sebagai Negara yang kaya akan sumber daya alam dan faktor geografis yang luas, Indonesia merupakan jalan keluar bagi kebutuhan Jepang terhadap kelangkaan sumber daya alam. Dilain pihak Indonesia yang masih dalam kondisi pembangunan serta dengan jumlah penduduk yang banyak membuat Negara ini merupakan pasar bagi perdagangan ekspor Jepang. Atas dasar hal tersebut Jepang menerapkan diplomasi ekonomi terhadap Indonesia. Jepang menggunakan bantuan ekonomi dan teknis sebagai sarana diplomasi ekonomi mereka.

Indonesia dan Jepang menandatangani perjanjian perdamaian pada bulan April 1958, dan sejak saat itu kedua negara telah menandatangani cukup banyak persetujuan dan pertukaran nota yang melandasi hubungan bilateral kedua negara yang mengatur mengenai kerja sama bidang pertanian, kehutanan, peningkatan produksi pangan dan bantuan keuangan.

Kerja sama multilateral, baik di forum PBB, ASEAN maupun organisasi internasional lainnya, merupakan sarana yang juga ikut mendekatkan ikatan hubungan bilateral Indonesia dengan Jepang. Perlu dibedakan antara kepentingan pemerintah di satu sisi dengan kepentingan swasta tidak dapat dilepaskan dari perhitungan "untung-rugi", sementara perhitungan pemerintah lebih dilandasi oleh kepentingan strategis.

Adanya kepentingan strategis tersebut menyebabkan pihak pemerintah Jepang terus berupaya menggerakkan swasta mengembankan hubungannya dengan Indonesia antara lain melalui program ODA (Official Development

Assistant) atau bantuan lain dengan bunga pinjaman yang tidak terlampaui memberatkan Indonesia. Bantuan ODA Jepang kepada Indonesia merupakan paket bantuan yang diberikan dalam bentuk pinjaman lunak, bantuan teknik dan hibah.

Dalam rangka mewujudkan kerja sama bilateral, antara Indonesia dan Jepang sepakat membentuk "Forum Bersama Pemerintah dan Swasta" di bidang investasi sebagai forum komunikasi dan dialog dengan tujuan antara lain memberikan solusi terbaik meningkatkan iklim investasi di Indonesia. Indonesia dan Jepang juga bersepakat menandatangani EPA atau Economic Partnerships Agreement, setelah terlebih dahulu membentuk Working Group yang membahas bersama, bertukar pendapat dan bernegosiasi mengenai kepentingan masing-masing melaksanakan perniagaan, pemanfaatan hasil industri, kerja sama di sektor pemanfaatan lalu lintas sumberdaya manusia dan barang, yang ditinjau dari sudut peraturan yang berlaku di masing-masing negara.

Memang ironis, bahwa kerjasama Indonesia dengan Jepang lebih bersifat ketidaksiimbangan, di mana Jepang lebih banyak diuntungkan daripada Indonesia. Selain secara ekonomi, kebudayaan dan produk Jepang telah berhasil menembus pemikiran masyarakat serta pasar di Indonesia.

Pada permulaan bulan Oktober tahun 2008, *Overseas Economic Cooperation Operations* (OECOs), bagian dari *Japan Bank for International Cooperation* (JBIC) sebagai penyedia pinjaman ODA Jepang dan bantuan hibah dibubarkan oleh Kementerian Luar Negeri dan telah digabungkan dengan

lembaga kerjasama dalam satu organisasi, 'New JICA'.⁷ JICA di resmikan sebagai satu-satunya lembaga yang bertugas menyalurkan bantuan ekonomi dan teknis kepada Negara-negara berkembang.

B. Tujuan Penelitian

Penelitian ini berjudul "diplomasi ekonomi jepang terhadap indonesia melalui Japan International Cooperation Agency (JICA)" bertujuan untuk mengetahui bagaimana upaya diplomasi ekonomi Jepang terhadap Indonesia melalui Japan International Cooperation Agency (JICA).

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan permasalahan yang telah dikemukakan di atas, maka untuk memudahkan pemecahan masalah dan sebagai pedoman dalam pembahasan lebih lanjut, dapatlah dirumuskan pokok permasalahan sebagai berikut:

"Bagaimana upaya diplomasi ekonomi Jepang terhadap Indonesia yang dilakukan oleh JICA?"

D. Landasan Teoritik

Teori berwujud sekupulan generalisasi dan karena di dalam generalisasi itu terdapat konsep-konsep, bisa juga di artikan bahwa teori adalah pernyataan yang menghubungkan konsep-konsep secara logis.⁸

⁷ *New JICA is Born. The Challenges Ahead for Japan's Development Assistance.*
<http://www.jica.go.jp/english/news/field/2008/081001.html>. Di akses tanggal 5 Juni 2013.

1. Konsep Diplomasi

Diplomasi adalah alat yang dipakai untuk melaksanakan politik luar negeri suatu negara. Diplomasi menurut Satow dalam *Satow's Guide to Diplomatic Practice* (1979) adalah pengaplikasian dari ilmu dan taktik untuk menjalankan hubungan resmi antara pemerintah dari dua atau lebih Negara yang berdaulat melalui jalan yang damai.⁹

Oxford English Dictionary merumuskan Diplomasi sebagai berikut : Diplomacy is (i) the management of International relation by Negotiation; (ii) the method by which these relations are adjusted and managed by ambassadors and envoys; (iii) the business or art by diplomats. Yang diterjemahkan sebagai berikut : Diplomasi adalah pengelola hubungan international dengan jalan perundingan; bagaimana cara para duta besar dan utusan-utusan lain yang mengatur dan mengelola hubungan-hubungan itu; tugas atau ekspresi seni dari para petugas itu.¹⁰

K.J.Holsti dalam *International politics* menjelaskan bahwa diplomasi adalah usaha suatu negara-bangsa untuk memperjuangkan kepentingan nasionalnya di kalangan masyarakat internasional.¹¹ Semenjak berakhirnya masa feodal di Jepang, perubahan dan perkembangan dari karakter politik luar negeri Jepang mengalami beberapa perkembangan yang tujuannya tidak terlepas dari kepentingan yang ingin dicapai dari kelompok pemerintah Jepang pada khususnya dan untuk memperoleh kesejahteraan rakyat pada umumnya.

⁸ Mohtar Mas' oed. *Ilmu Hubungan Internasional: Disiplin dan Metodologi*. Jakarta: LP3S. 1990. Hal. 186

⁹ Wishber Loeis, makalah : Instrument of Foreign Policy, sebagai bahan ajar SEKDILU 32, 16 Maret 2007.

¹⁰ Ibid.

¹¹ Holsti, KJ. *International Politics*. 1984. Hal. 82.

Setelah kekalahan Jepang pada Perang Dunia II, berbagai upaya dilakukan oleh pemerintah Jepang untuk merubah dan menentukan arah diplomasinya di lingkungan internasional. Sehingga dalam pelaksanaan kebijakan luar negerinya Jepang seringkali mengalami berbagai macam perubahan dan perkembangan dalam menentukan karakter diplomasinya agar sesuai dengan perkembangan zaman di lingkungan internasional. Secara umum arah kebijakan luar negeri yang berubah tersebut tentunya merupakan pengaruh dari sasaran yang ingin dicapai dari kebijakan dalam negeri Jepang sendiri.

Karena dalam sejarah dunia, Jepang pernah dikenal sebagai salah satu negara dengan kekuatan militer yang kuat di masa perang Dunia berlangsung, maka bukanlah tugas yang mudah bagi Jepang untuk merubah citra baru tersebut kepada masyarakat internasional. Berbagai kecurigaan dan rasa takut dari negara-negara bekas jajahan Jepang akan kembalinya Jepang bertindak seperti pada masa kejayaan militerismenya di masa perangpun merupakan faktor penting sebagai penentu keberhasilan diplomasi Jepang di lingkungan internasional.

a. Diplomasi Ekonomi

Diplomasi ekonomi merupakan terminologi yang relatif baru. Adapun definisi diplomasi ekonomi sebagai berikut:

Economic diplomacy is concerned with economic policy issues, e.g. work of delegations at standard setting organisations such as WTO and BIS. Economic diplomats also monitor and report on economic policies in foreign countries and advise the home government on how to best influence them. Economic Diplomacy employs economic resources, either

as rewards or sanctions, in pursuit of a particular foreign policy objective. This is sometimes called 'economic statecraft'.¹²

Dari penjelasan tersebut di atas, diplomasi ekonomi pada intinya menekankan pentingnya upaya untuk memformulasikan dan mengatur kebijakan yang terkait dengan produksi, pergerakan dan pertukaran barang, jasa, tenaga kerja, atau sumber daya produksi lainnya dalam konteks hubungan internasional. Kebijakan-kebijakan tersebut dapat terkait langsung dalam hubungan antar negara, maupun dalam konteks standar internasional dan tata cara peraturan dalam kerangka suatu organisasi internasional.

William R. Nester, menggambarkan bentuk dari gaya diplomasi Jepang adalah sebagai berikut.¹³

"The Japanese approach to diplomatic negotiation is dominated by a philosophy of risk minimalization and confrontation avoidance. And so does in Japanese diplomacy its economic power is a strategic instrument that must give maximum benefit to Japan interests."

Diplomasi ekonomi yang dijalankan Jepang merupakan bentuk usaha pemerintahan Jepang dalam upaya membangkitkan negaranya yang kalah akibat perang. Jepang meyakini bahwa dalam pencapaian perolehan-perolehan ekonomi telah memainkan peranan yang penting dalam menjalankan diplomasinya di dunia internasional. Bagi Jepang memperkuat negaranya dengan meningkatkan kemakmuran ekonomi akan lebih mempermudah Jepang dalam melakukan proses tawar menawar dalam upaya memenangkan diplomasi di lingkungan internasional.

¹² G. R. Berridge and Alan James, *A Dictionary of Diplomacy*, 2nd Edition, Palgrave Macmillan, New York, 2003, hal. 91

¹³ Nester, William R. *"Japan and The Third World"*, London, Macmillan Press, 1992, hal.47

E. Hipotesa

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan serta kerangka dasar teori maka dapat diperoleh hipotesa atau jawaban sementara bahwasannya diplomasi ekonomi Jepang terhadap Indonesia yang disalurkan oleh JICA adalah:

1. Memberikan bantuan pinjaman (Yen)
2. Memberikan bantuan dana hibah
3. Melakukan kerjasama teknis.

F. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data berupa studi dokumen yang dilakukan dengan cara menghimpun data sekunder dalam hal ini diwakili oleh informasi-informasi dari literatur-literatur yang relevan seperti buku, majalah, surat kabar, dan data elektronik (internet) yang berkaitan dengan pokok permasalahan.

G. Batasan Penelitian

Untuk menghindari adanya pelebaran penjelasan mengenai diplomasi ekonomi Jepang terhadap Indonesia oleh JICA maka dibutuhkan batasan penelitian. Adapun batasan penelitian ini dimulai setelah krisis ekonomi yang melanda Asia atau setelah tahun 1998 sampai saat ini.

H. Sistematika Penulisan

BABI Menjelaskan tentang pendahuluan yang memuat tentang alasan pemilihan judul, latar belakang masalah, pokok permasalahan,

kerangka dasar teori, hipotesa, tujuan penulisan, jangkauan penelitian, tehnik pengumpulan data, dan sistematika penulisan.

- BAB II Membahas tentang sejarah Diplomasi Ekonomi Jepang.
- BAB III Menjelaskan tentang Hubungan Jepang-Indonesia.
- BAB IV Membahas mengenai Diplomasi Ekonomi Jepang terhadap Indonesia Melalui Japan International Cooperation Agency (JICA).
- BAB V Merupakan kesimpulan atau penutup dari keseluruhan bab yang telah dibahas, berisi ringkasan singkat tentang penelitian yang disusun oleh penulis dari seluruh hal yang dikemukakan pada bab-bab sebelumnya.